REVISI

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Direktorat PDLKWS ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Direktorat PDLKWS yang disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan.

Substansi Renstra Direktorat PDLKWS 2015-2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.9/PKTL-Set-2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019. Revisi I ini merupakan perbaikan/ penyesuaian sebagai tiindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan diselesaikannya Renstra ini maka acuan perencanaan Pencegahan Dampak Lingungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sudah tersedia sehingga sasaran kegiatan diharapkan dapat dicapai dengan baik sampai akhir tahun 2019.
Saya mengharapkan agar jajaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dapat secara konsekuen melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya pencegahan dampak lingkungan di tingkat wilayah dan sektor sebagaimana tertuang pada Renstra ini dapat dicapai guna memenuhi amanat RPJMN sekaligus dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Jakarta, April 2017
Direktur,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP
NIP. 19690205 199503 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan 1
Tujuan, Arah Kebijakan, dan Strategi 4
Sasaran dan Indikator Kegiatan 5
Kerangka Pendanaan 13
Penutup 14
Lampiran 15

Kondisi Umum

Mengutip pernyataan dalam pendahuluan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang di Indonesia senantiasa menampilkan dua sisi yang saling berlainan : pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir memperlihatkan pencapaian yang relatif baik, dibandingkan negara-negara lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,78% di tahun 2013. Namun demikian, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), selama 3 tahun terakhir justru menunjukkan penurunan (Tahun 2011 sebesar 65,50; Tahun 2012 sebesar 64,21; dan Tahun 2013 sebesar 63,1).

Penurunan kualitas lingkungan hidup pada kenyataannya merupakan sebuah konsekuensi yang pasti terjadi seiring berubahnya kondisi fisik lingkungan akibat pembangunan,

Beberapa perubahan berlangsung sangat cepat dan nyata, seperti pada pembangunan di wilayah perkotaan. Sementara perubahan diam-diam dalam skala yang luas terus terjadi di luar wilayah perkotaan. Perubahan tersebut secara nyata telah merubah kondisi dan keseimbangan ekosistem yang dalam skala akumulatif menyebabkan terjadinya bencana dalam bentuk longsor, banjir, kebakaran lahan dan hutan, krisis air bersih, kekurangan pangan, kondisi udara yang buruk dan wabah penyakit.

Berbagai bentuk kerusakan dan bencana lingkungan seringkali merupakan permasalahan lingkungan yang timbul akibat daya dukung lingkungan hidup yang terlampaui, terutama akibat adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Berdasarkan statistik, sebagai akibat dari pertambahan penduduk selama periode 1990 – 2010, telah terjadi penurunan luas hutan, pertanian lahan kering, dan sawah masing-masing sebesar 5%, 20%, dan 7% dan peningkatan luas pemukiman dan lahan kosong sebesar 13,9% dan perkebunan 14,5%.

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka daya dukung lingkungan hidup seharusnya menjadi salah satu pertimbangan terpenting dalam perencanaan pembangunan, baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJM dan RPJP). Salah satu upaya untuk mengarusutamakan hal tersebut adalah dengan memperkuat pengendalian kebijakan pembangunan wilayah, yang dalam proses penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dijabarkan dalam Kegiatan Pencegahaan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang kemudian menjadi salah satu Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas *melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.*

Organisasi

- *perumusan kebijakan* di bidang DDDT LH, perencanaan PPLH, KLHS dan pengelolaan ekoregion
- *pelaksanaan kebijakan* di bidang DDDT LH, perencanaan PPLH, KLHS dan pengelolaan ekoregion
- *koordinasi dan sinkronisasi* di bidang DDDT LH, perencanaan PPLH, KLHS dan pengelolaan ekoregion
- *penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria* di bidang daya DDDT LH, perencanaan PPLH, KLHS dan pengelolaan ekoregion
- *pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis* di bidang DDDT LH, perencanaan PPLH, KLHS dan pengelolaan ekoregion
- *pelaksanaan supervisi* atas pelaksanaan urusan daya DDDT LH, perencanaan PPLH, KLHS dan pengelolaan ekoregion di daerah
- *pelaksanaan administrasi* Direktorat

Bisnis Proses Direktorat PDLKWS

OBYEK

RPJMN/RPJMD, RTRWN/RTRWP/RTRWK/RDTR, Program Sektoral/Multisektoral Prioritas

SUBYEK

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hasil Kegiatan 2011-2014

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor merupakan direktorat baru yang terbentuk setelah penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, beberapa tupoksi 5 tahun ke depan merupakan kegiatan yang sebelumnya berada dibawah Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Capaian kegiatan s/d Tahun 2014

Bidang	Hasil Kegiatan
RPPLH	Analisis jasa ekosistem ekoregion pulau/kepulauan Dokumen awal RPPLH Nasional sebagai masukan RPJMN 2015-2019
KLHS	KLHS pada 5 K/L Pembuat KRP 25 KLHS untuk RTRW 33 KLHS untuk RPJMD
Valuasi Ekonomi Lingkungan	PDRB Hijau di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua
Pemetaan Ekoregion	Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan Skala 1 : 500.000

Potensi dan Permasalahan

Dimasa dimana isu lingkungan menjadi begitu penting dan genting, output yang berkualitas dari tupoksi Direktorat PDLKWS menjadi sangat relevan dan diharapkan. Akan tetapi sebagai direktorat baru di dalam lingkungan yang juga baru, harapan tersebut dapat menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dijawab. Kondisi SDM, Penganggaran, dan NSPK merupakan titik kritis permasalahan yang akan menentukan kinerja dan kualitas output.

Kekuatan

1. Pengetahuan dan pengalaman yang sangat memadai dalam bidang tugas
2. Jaringan kerja yang luas dan fleksibel, baik di pusat, pemerintah daerah, maupun dengan NGO.

Kelemahan

1. SDM Direktorat masih terbatas, baik jumlah maupun kemampuannya;
2. Alokasi anggaran belum seimbang dengan beban tupoksi;
3. NSPK kegiatan dan operasional satuan kerja belum tersusun secara lengkap.

Kesempatan

1. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu dunia yang viral, penting, dan didorong oleh banyak pihak;
2. Dukungan secara tegas dari UU 23/2014 melalui kewajiban penyusunan RPPLH dan KLHS.

Ancaman

1. Perencanaan Penataan lingkungan merupakan proses prakondisi yang terus menerus dan hasilnya tidak dapat dinikmati secara instan, sehingga berpotensi diabaikan.
2. Kondisi masyarakat yang karena kebutuhannya, masih sangat kuat mendorong eksploitasi sumberdaya alam.

Gambar 3. Matrik SWOT Proses Bisnis Direktorat PDLKWS

Direktorat PDLKWS merupakan satu elemen pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi pembangunan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2015 - 2019. Disamping itu, diharapkan juga menjadi bagian penting untuk mendukung Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional, khususnya terkait Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

Untuk dapat menjalankan peran tersebut, maka kegiatan tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk :

Arah Kebijakan	Strategi
1. Memperkuat kinerja Direktorat;	1. Penyempurnaan SOP Kegiatan dan Pelayanan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 3. Memenuhi standar minimal sarana dan prasarana perkantoran 4. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendalaman pengetahuan lapangan
2. Memperkuat dan memperluas jejaring kerja, baik di pusat, daerah, maupun dengan lembaga non pemerintah, baik lokal maupun internasional;	1. Meningkatkan koordinasi kegiatan dan sinkronisasi kebijakan antar instansi 2. Melibatkan diri secara aktif dalam forum-forum lingkungan hidup, baik di lingkungan pemerintahan maupun non pemerintahan 3. Membangun kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka *transfer of knowledge* isu-isu lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan sebagai langkah awal dalam menjaga, mempertahankan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;	1. Menyusun dan menyempurnakan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan SKB lingkup Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor; 2. Meningkatkan bimbingan/asistensi teknis terkait perencanaan pengelolaan, kajian strategis lingkungan hidup, dan hal-hal terkait lainnya. 3. Meningkatkan pelayanan publik melalui review dokumen
4. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian Pemerintah Daerah terkait konsep pembangunan berkelanjutan;	1. Menyelenggaran forum-forum nasional sebagai upaya menjaga keterlibatan parapihak dalam mendukung kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup 2. Melakukan sosialisasi dan asistensi penerapan NSPK. 3. Mengoptimalkan peran teknologi informasi berbasis internat sebagai media publikasi, sosialisasi, dan pembelajaran.

Sasaran Kinerja

Sesuai dengan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat PDLKWS melalui Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (P9.K4), dibebani 3 (tiga) sasaran kegiatan, yaitu :

1. *Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas*
2. *Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD*
3. *Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau.*

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, kegiatan PDLKWS dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) unit kegiatan, yaitu :

1. *Pengendalian kualitas KLHS berbasis DDDT sebanyak 100 KLHS per tahun*
2. *Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun*
3. *Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional*
4. *Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi*
5. *Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota*
6. *Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup*
7. *Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000*
8. *Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau*
9. *Layanan Perkantoran*
10. *Good Governance*

Tabel 2. Matrik Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Unit Keg.	Indikator Unit Keg.	Sasaran Elemen Keg.	Indikator Elemen Keg.
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (P9.K4)					
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas (S3.P9.4.K4.1)	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	*Pengendalian kualitas KLHS berbasis DDDT sebanyak 100 KLHS per tahun (UK1)*			
		Terjaminnya Kualitas KLHS berbasis DDDT (S3.P9.4.K4.1.UK1)	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	*Bimbingan Teknis KLHS Sektor (EK1)*	
				Terlaksananya Bimtek penjaminan kualitas KLHS Sektor berbasis DDDT (S3.P9.4.K4.1.UK1.EK1)	Dokumen tertulis Hasil Bimtek KLHS Sektor berbasis DD DT sebanyak 50 KLHS per tahun
				Bimbingan Teknis KLHS daerah (EK2)	
				Terlaksananya Bimtek penjaminan kualitas KLHS daerah berbasis DDDT (S3.P9.4.K4.1.UK1.EK2)	Dokumen Tertulis Hasil Bimtek KLHS Daerah berbasis DD DT sebanyak 50 KLHS per tahun
				Penyusunan NSPK KLHS (EK3)	
				Tersusunnya NSPK Penyusunan dan Bimtek KLHS (S3.P9.4.K4.1.UK1.EK3)	Jumlah NSPK KLHS yang tersusun
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	*Pengendalian kualitas KLHS berbasis DDDT sebanyak 100 KLHS per tahun (UK1)*			
		Tereviewnya kelayakan Dokumen KLHS (S3.P9.4.K4.1.UK2)	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHSper tahun	*Validasi kelayakan KLHS Sektor (EK1)*	
				Tervalidasinya kelayakan Dokumen KLHS Sektor (S3.P9.4.K4.1.UK2.EK1)	Jumlah KLHS Sektor yang tervalidasi Kelayakannya sebanyak 50 KLHS per tahun
				Validasi kelayakan KLHS Daerah (EK2)	
				Tervalidasinya kelayakan Dokumen KLHS Daerah (S3.P9.4.K4.1.UK2.EK2)	Jumlah KLHS Daerah yang tervalidasi Kelayakannya sebanyak 50 KLHS per tahun
	Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	*Pengendalian dan Penjaminan Kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K (UK3)*			
		Terjaminnya kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K berbasis DDDT (S3.P9.4.K4.1.UK11)	Jumlah KLHS yang terjamin dan tervalidasi kelayakannya	*Bimbingan Teknis KLHS RTRLN dan RZWP3K(EK1)*	
				Terlaksananya Bimtek penjaminan kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K berbasis DDDT (S3.P9.4.K4.1.UK11.EK1)	Dokumentasi tertulis Hasil Bimtek KLHS RTRLN dan RZWP3K
				Validasi kelayakan KLHS RTRLN dan RZWP3K(EK2)	
				Tervalidasinya kelayakan kelayakan KLHS RTRLN dan RZWP3K berbasis DDDT	Jumlah KLHS RTRLN dan RZWP3K yang tervalidasi kelayakannya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Unit Keg.	Indikator Unit Keg.	Sasaran Elemen Keg.	Indikator Elemen Keg.
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (P9.K4)					
Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD (S3.P9.4.K4.2)	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah,1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	*Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional (UK3)*			
		Tersusunnya Dokumen RPPLH Nasional (S3.P9.4.K4.2.UK3)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah	*Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional (EK1)*	
				Tersedianya RPPLH Nasional Tahun 2015 - 2035 (S3.P9.4.K4.2.UK3.EK1.1)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun
				Tersusunnya NSPK RPPLH (S3.P9.4.K4.2.UK3.EK1.2)	Jumlah NSPK RPPLH yang tersusun
				Review RPPLH Nasional (EK2)	
				Tersusunnya Hasil Review Midterm dan atau 5 tahunan Dokumen RPPLH Nasional (S3.P9.4.K4.2.UK3.EK2)	Jumlah Laporan Hasil Review Midterm dan Review RPPLH Nasional
				Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis urusan RPPLH Nasional (EK3)	
				Diterapkannya RPPLH Nasional sebagai acuan dalam RPJMN dan RPPLH Daerah (S3.P9.4.K4.2.UK3.EK3)	Jumlah Provinsi yang mengacu RPPLHN dalam RPPLH Provinsi
		Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi (UK4)			
		Tersusunnya RPPLH Provinsi (S3.P9.4.K4.2.UK4)	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	*Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi (EK1)*	
				Tersusunnya RPPLH Provinsi (S3.P9.4.K4.2.UK4.EK1.1)	Dokumentasi Tertilis Hasil Fasilitasi/ Bimtek/ Asistensi RPPLH Provinsi
				Tersusunnya Pedoman Bintek RPPLH Provinsi (S3.P9.4.K4.2.UK4.EK1.2)	Jumlah Pedoman RPPLH Provinsi yang tersusun

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Unit Keg.	Indikator Unit Keg.	Sasaran Elemen Keg.	Indikator Elemen Keg.
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (P9.K4)					
Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD (S3.P9.4.K4.2)	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah,1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	*Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota (UK5)*			
		Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (S3.P9.4.K4.2.UK5)	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	*Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota (EK1)*	
				Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (S3.P9.4.K4.2.UK5.EK1)	Dokumentasi Tertulis Hasil Fasilitasi/ Bimtek/ Asistensi RPPLH Kab/ Kota
				Penyusunan NSPK Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota (EK2)	
				Tersusunnya Pedoman Bintek RPPLH Kabupaten/Kota (S3.P9.4.K4.2.UK5.EK2)	Jumlah Pedoman RPPLH Kab/Kota yang tersusun
		Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (UK6)			
		Tersusunnya indeks daya dukung dan daya tampung LH Nasional (S3.P9.4.K4.2.UK 6)	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	*Penetapan indikasi DDDT lingkungan hidup (EK1)*	
				Tersusunnya/terbaharuinya indikasi DDDT Lingkungan Hidup Nasional (S3.P9.4.K4.2.UK6.EK1)	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional
				Pengembangan Perangkat DDDT Lingkungan Hidup (EK2)	
				Tersedianya pedoman penyusunan DDDT LH sebagai acuan penetapan DDDTLH provinsi dan Kab/Kota (S3.P9.4.K4.2.UK6.EK2)	Jumlah pedoman penyusunan DDDT LH yang disusun
				Penerapan Instrumen DDDTLH di daerah (EK3)	
				Terstandarnya metode penyusunan DDDT LH di Daerah (S3.P9.4.K4.2.UK6.EK3)	Jumlah Provinsi yang mengacu Pedoman KLHK dalam penetapan DDDT LH nya.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Unit Keg.	Indikator Unit Keg.	Sasaran Elemen Keg.	Indikator Elemen Keg.
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (P9.K4)					
Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD (S3.P9.4.K4.2)	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah,1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	*Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000 (UK7)*			
		Tersedianya peta ekoregion skala 1:250000 (S3.P9.4.K4.2.UK7)	satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	*Pemetaan Ekoregion (EK1)*	
				Tersedianya peta ekoregion skala 1 : 250.000 (S3.P9.4.K4.2.UK7.EK1)	satuan peta ekoregion skala 1 : 250.000
				Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Ekoregion (EK2)	
				Diterapkannya konsep Ekoregion dalam proses perencanaan pembangunan di daerah (S3.P9.4.K4.2.UK7.EK2)	Jumlah Provinsi yang menerapkan konsep ekoregion dalam perencanaan wilayah
Tersusunnya neracaSDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	*Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau (UK8)*			
		Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau (S3.P9.4.K4.3.UK8)	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	*Penyusunan Neraca SDH Lingkungan Hidup (EK1)*	
				Tersusunnya neraca SDH LH Kab/Kota (S3.P9.4.K4.3.UK8.EK1)	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH
				Penyusunan PDRB Hijau (EK2)	
				Tersusunnya PDRB Hijau Kab/Kota (S3.P9.4.K4.3.UK8.EK2)	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki PDRB Hijau
				Penyusunan dan Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan (EK3)	
				Tersusunnya perangkat ekonomi Lingkungan (S3.P9.4.K4.3.UK8.EK3)	Jumlah Dokumen NSPK perangkat ekonomi lingkungan yang tersedia

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sasaran Unit Keg.	Indikator Unit Keg.	Sasaran Elemen Keg.	Indikator Elemen Keg.
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (P9.K4)					
Terselenggaranya kegiatan Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor yang efektif dan efisien (S3.P9.4.K4.4)	Kegiatan perkantoran berjalan lancar selama 12 Bulan	*Layanan Perkantoran (UK9)*			
		Terselenggaranya kegiatan perkantoran Direktorat PDLKWS secara tertib dan lancar (S3.P9.4.K4.4.UK9)	Kegiatan Dasar Perkantoran berjalan lancar selama 12 Bulan	*Layanan Perkantoran (EK.1)*	
				Terselenggaranya kegiatan dasar perkantoran Direktorat (S3.P9.4.K4.4.UK9.EK1)	Kegiatan perkantoran berjalan dengan baik
		Good Governance (UK10)			
		Terselenggaranya manajemen pelayanan kantor yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel (S3.P9.4.K4.4.UK10)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	*Dukungan Operasional Kegiatan (EK1)*	
				Meningkatkan pelayanan dan operasional perkantoran sebagai pendukung kegiatan Direktorat (S3.P9.4.K4.4.UK10.EK1)	Dukungan pelayanan kantor berjalan efektif selama 12 bulan
				Dukungan Manajemen Kegiatan (EK2)	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Standar Kinerja Direktorat (S3.P9.4.K4.4.UK10.EK2)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Standar Operasional
				Peningkatan Kualitas SDM (EK3)	
				Meningkatnya kualitas SDM Direktorat dalam mendukung pelayanan Direktorat (S3.P9.4.K4.4.UK10.EK3)	Jumlah staf yang mengikuti Diklat/Pelatihan/Pembinaan Pegawai
				Pengembangan Data dan Informasi PDLKWS (EK4)	
				Tersedianya Data dan Informasi terkait kegiatan Direktorat yang aksesibel, dan valid, dan terbaharui. (S3.P9.4.K4.4.UK10.EK4)	1 laporan hasil dokumentasi data selama 12 bulan

Berdasarkan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, alokasi anggaran APBN untuk merealisasikan 3 (tiga) sasaran kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor selama 5 (lima) tahun sebesar 33,04 (Tiga Puluh Tiga koma Nol Empat) Miliar rupiah untuk membiayai 10 (Sepuluh) Unit Kegiatan. Alokasi tersebut, masih belum berimbang dengan volume target yang dibebankan maupun dengan perkiraan perkembangan permintaan pelayanan teknis dari sektor dan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian beban berdasarkan anggaran aktual tahunan sebagaimana dalam DIPA dengan mempertimbangkan :

1. Skala Prioritas kegiatan;
2. Metode pelaksanaan kegiatan;
3. Perkiraan kebutuhan minimal operasional perkantoran
4. Peluang kerjasama pendanaan terbatas dengan Pemerintah daerah dan lembaga donor/lembaga penelitian lingkungan hidup.

Unit kegiatan	Alokasi (Rp M /5 tahun)
1. Pengendalian kualitas KLHS berbasis DDDT	2,3
2. Review kelayakan KLHS	5,3
3. Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional	2,3
4. Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi	1,7
5. Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	1,7
6. Penetapan dan update (pembaruan) indikasi DDDTLH	4,9
7. Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	3,9
8. Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	3,9
9. Layanan Perkantoran	4,9
10. *Good Governance*	2,14

Rancangan strategis ini merupakan *gambaran secara garis besar dari kegiatan Direkorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor* yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan selama lima tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis ini menjadi *acuan seluruh Bidang Teknis dan Bagian Tata Usaha dalam menyusun kegiatan* masing-masing sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dan *sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan*.

Dengan tersusunnya Rencana strategis ini, diharapkan pembangunan didalam rangka *pencegahan dampak lingkungan terkait kebijakan selama 5 (lima) tahun lebih terarah, efifien, dan efektif* yang pada akhirnya dapat *meningkatkan kualitas lingkungan hidup nasional sebagai penyangga kehidupan masyarakat Indonesia*.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Sasaran Kegiatan : 1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas (S3.P9.4.K4.1)
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD(S3.P9.4.K4.2)
3. Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau(S3.P9.4.K4.3)

Unit Kegiatan	Sasaran (Outcome/Output) Unit kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Target (Kumulatif)					Alokasi Anggaran (x1000)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian kualitas KLHS berbasis DDDT sebanyak 100 KLHS per tahun (UK1)	Terjaminnya Kualitas KLHS berbasis DDDT (S3.P9.4.K4.1.UK1)	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Bimbingan Teknis KLHS Sektor (EK1)	Dokumen Tertulis Hasil Bimtek KLHS Sektor Berbasis DDDT LH	(50 KLHS)	50 (100 KLHS)	50 (150 KLHS)	50 (200 KLHS)	50 (250 KLHS)	702.400	417.676	487.288	522.094	556.901
			Bimbingan Teknis KLHS daerah (EK2)	Dokumen Tertulis Hasil Bimtek KLHS Daerah Berbasis DDDT LH	(50 KLHS)	50 (100 KLHS)	50 (150 KLHS)	50 (200 KLHS)	50 (250 KLHS)					
			Penyusunan NSPK KLHS (EK2)	Jumlah NSPK KLHS yang tersusun	1 Dok.	1 (2 Dok.)	1 (3 Dok.)	(3 Dok.)	(3 Dok.)					
Validasi kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun (UK2)	Tervlidasinya kelayakan Dokumen KLHS (S3.P9.4.K4.1.UK2)	Jumlah KLHS yang tervlidasi kelayakannya	Validasi kelayakan KLHS Sektor (EK1)	Jumlah KLHS Sektor yang tervalidasi kelayakannya	(50 KLHS)	50 (100 KLHS)	50 (150 KLHS)	50 (200 KLHS)	50 (250 KLHS)	422.880	962.470	1.122.881	1.203.087	1.283.293
			Validasi kelayakan KLHS Daerah (EK2)	Jumlah KLHS Daerah yang tervaliasi kelayakannya	(50 KLHS)	50 (100 KLHS)	50 (150 KLHS)	50 (200 KLHS)	50 (250 KLHS)					
			Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (EK3)	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi	1 Laporan	1 (2 Laporan)	1 (3 Laporan)	1 (4 Laporan)	1 (5 Laporan)					
Pengendalian dan Penjaminan Kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K (UK11)	Terjaminnya kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K berbasis DDDT (S3.P9.4.K4.1.UK11)	Jumlah KLHS RTRLN dan RZWP3K yang terjamin dan tervalidasi kelayakannya	Bimbingan Teknis KLHS RTRLN dan RZWP3K (EK1)	Dokumen Tertulis Hasil Bimtek KLHS RTRLN dan RZWP3K			2 KLHS	10 (12 KLHS)	10 (22 KLHS)			260.000	600.000	600.000
			Validasi kelayakan KLHS RTRLN dan RZWP3K (EK2)	Jumlah KLHS RTRLN dan RZWP3K yang tervaliasi kelayakannya			2 KLHS	10 (12 KLHS)	10 (22 KLHS)					
Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional (UK3)	Tersusunnya Dokumen RPPLH Nasional (S3.P9.4.K4.2.UK3)	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun, Jumlah Review Midterm, dan Review 5 tahunan	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional (EK1)	Jumlah Dokumen RPPLH Nasional yang tersusun	1 Dokumen RPPLH Nasional	1 Dokumen Arahan Implementasi RPPLH Nasional	-	1 Dokumen Arahan Implementasi RPPLH Nasional	-	467.550	417.676	487.288	522.094	556.901
				Jumlah NSPK RPPLH yang tersusun		1 Dokumen RPP	1 Dokumen RPP	1 Dokumen RPP	1 Dokumen RPP					
			Review RPPLH Nasional (EK2)	Jumlah Hasil Review RPPLH Nasional	-	-	1 Laporan Hasil Review Midterm RPPLH Nasional	-	1 Dokumen hasil review 5 tahunan RPPLH Nasioal					
			Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis urusan RPPLH Nasional (EK3)	Jumlah Provinsi yang menerapkan RPPLH nasional sebagai acuan RPPLH Provinsi		6 Prov	7 (13 Prov)	14 (27 Prov)	7 (34 Prov)					

Unit Kegiatan	Sasaran (Outcome/Output) Unit kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Target (Kumulatif)					Alokasi Anggaran (x1000)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi (UK4)	Tersusunnya RPPLH Provinsi (S3.P9.4.K4.2.UK4)	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi (EK1)	Dokumen Tertulis Hasil Fasilitasi/Bimtek/Asistensi RPPLH Provinsi	6 Provinsi di Ekoregion Jawa	7 Provinsi di Ekoregion Sumatera	7 Provinsi di Ekoreg Kalimantan dan sebagian Sumatera	6 Provinsi di Ekoregion Sulawesi	7 Provinsi di Ekoregion Maluku, Papua, dan Bali Nusra	183.115	308.717	360.169	385.896	411.622
			Penyusunan NSPK RPPLH Provinsi (EK2)	Jumlah NSPK RPPLH Provinsi yang tersusun		1 Dokumen	(1 Dok)	(1 Dok)	(1 Dok)					
Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota (UK5)	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (S3.P9.4.K4.2.UK5)	Jumlah RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota (EK1)	Dokumen Tertulis Hasil Fasilitasi/Bimtek/Asistensi RPPLH Kabupaten		10 Kab/Kota di Ekoregion Jawa	10 Kab/Kota di Ekoregion Sumatera	10 Kab/Kota di Ekoregion Kalimantan	10 Kab/Kota di Ekoregion Sulawesi	199.236	308.717	360.169	385.896	411.622
			Penyusunan NSPK RPPLH Kab/Kota (EK2)	Jumlah NSPK RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun			1 Dokumen	(1 Dok)	(1 Dok)					
Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (UK6)	Tersusunnya indeks daya dukung dan daya tampung LH Nasional (S3.P9.4.K4.2.UK6)	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan indikasi DDDT lingkungan hidup (EK1)	Jumlah Penetapan Indikasi Daya Dukung Nasional	6 Penetapan indikasi daya dukung	6 Penetapan indikasi daya dukung (terbaharui)	6 Penetapan indikasi daya dukung (terbaharui)	6 Penetapan indikasi daya dukung (terbaharui)	6 Penetapan indikasi daya dukung (terbaharui)	652.410	889.831	1.038.136	1.112.288	1.186.441
			Pengembangan Perangkat DDDT Lingkungan Hidup (EK2)	Jumlah Pedoman DDDTLH yang disusun/direview	-	3 Pedoman	3 Pedoman	3 Pedoman	3 Pedoman					
			Penerapan Instrumen DDDTLH di daerah (EK3)	Jumlah Provinsi yang mengacu Pedoman KLHK dalam penetapan DDDTLH daerah	-	16 Prov	24 Prov	30 Prov	34 Prov					
Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000 (UK7)	Tersedianya peta ekoregion skala 1:250000 (S3.P9.4.K4.2.UK7)	Satuan peta ekoregionpada skala 1 : 250.000	Pemetaan Ekoregion (EK1)	Satuan peta ekoregionpada skala 1 : 250.000		9 satuan peta di ekoregion sulawesi	12 satuan peta di ekoregion Jawa dan 27 satuan peta di ekorgion Bali Nusra	5 satuan peta di ekoregion Maluku dan 50 satuan peta di ekorgion Papua	51 satuan peta di ekoregionSumatera dan 51 satuan peta di ekorgion Kalimantan	558.448	708.232	826.271	885.291	944.310
			Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoregion (EK2)	Jumlah Provinsi yang menerapak konsep ekoregion dalam penetapan DDDTLH		16 Prov	8 (24 Prov)	6 (30 Prov)	4 (34 Prov)					
Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau (UK8)	Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau (S3.P9.4.K4.3.UK8)	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki neraca SDALH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA Lingkungan Hidup (EK1)	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki neraca SDALH	1 neraca SDALH Provinsi pada ekoregion Jawa	1 neraca SDALH Kab/Kota pada ekoregion Jawa	10 neraca SDALH Kab/Kota pada ekoregion Kalimantan	10 neraca SDALH Kab/Kota pada ekoregion Sumatera	10 neraca SDALH Kab/Kota pada ekoregion Sumatera	552.660	708.232	826.271	885.291	944.310
			Penyusunan PDRB Hijau (EK2)	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki PDRB Hijau	1 PDRB Hijau Provinsi pada ekoregion Jawa	1 PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa	10 PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Kalimantan	10 PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Sumatera	10 PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Sumatera					

Unit Kegiatan	Sasaran (Outcome/Output) Unit kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Target (Kumulatif)					Alokasi Anggaran (x1000)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau (UK8)	Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau (S3.P9.4.K4.3.UK8)	jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki neraca SDALH dan PDRB Hijau	Penyusunan dan Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan (EK3)	Jumlah Dokumen Perangkat Ekonomi Lingkungan yang tersedia	-	1 Dokumen	2 (3 Dok)	(3 Dok)	(3 Dok)					
Layanan Perkantoran (UK9)	Terselenggaranya kegiatan perkantoran Direktorat PDLKWS secara tertib dan lancar (S3.P9.4.K4.4.UK9)	Kegiatan Perkantoran berjalan lancar selama 12 Bulan	Layanan Perkantoran (EK.1)	Kegiatan Perkantoran Berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	645.000	889.831	1.038.136	1.112.288	1.186.441
Good Governance (UK10)	Terselenggaranya manajemen pelayanan kantor yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel (S3.P9.4.K4.4.UK10)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dukungan Operasional Kegiatan (EK1)	Dukungan pelayanan kantor berjalan efektif selama 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		388.620	453.390	485.775	518.160
			Dukungan Manajemen Kegiatan (EK2)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan SOP	5 Judul	4 (9 Judul)	4 (13 Judul)	4 (17 Judul)	4 (21 Judul)					
			Peningkatan Kapasitas SDM (EK4)	Jumlah Staf yang mengikuti diklat/pelatihan/pembinaan pegawai										
			Pengembangan Data dan Informasi PDLKWS (EK5)	laporan dokumentasi data dan informasi	1 Judul	1 (2 Judul)	1 (3 Judul)	1 (4 Judul)	1 (5 Judul)					

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan kebijakan Wilayah dan Sektor
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jl. DI Panjaitan Kav. 24
Kebon Nanas - Jakarta Timur

www.facebook.com/dit.pdlkws

http://pktl.menlhk.go.id